

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Banjir merupakan fenomena lingkungan yang sering dibicarakan. Hal ini tentu saja dikarenakan banyak wilayah di Indonesia pada saat musim hujan sering dilanda banjir. BAKORNAS PB mencatat antara tahun 2003 – 2005 telah terjadi 1.429 kejadian bencana di Indonesia, sebagian dari bencana tersebut 53,3% merupakan bencana hidrometeorologi, yang paling sering terjadi adalah banjir (34,1%) dan diikuti oleh tanah longsor (16%). Kejadian banjir berdampak pada kehidupan manusia dan lingkungannya terutama dalam hal korban jiwa dan kerugian yang bersifat materi. Contohnya pada tahun 2006 telah terjadi banjir bandang di Jawa Timur, di daerah Jember menyebabkan 92 orang meninggal dan 8.861 orang mengungsi, serta daerah Trenggalek yang menyebabkan 18 orang meninggal. Manado juga pernah terjadi banjir disertai tanah longsor yang menyebabkan 27 orang meninggal dengan jumlah orang yang mengungsi mencapai 30.000 orang. Banjir disertai tanah longsor juga melanda Sulawesi Selatan pada Bulan Juni 2006 dengan korban lebih dari 200 orang meninggal dan puluhan orang dinyatakan hilang (BAKORNAS PB, 23 Juni 2006 dalam RAN PRB).

Sebagai negara yang beriklim tropis, Indonesia memiliki curah hujan yang cukup tinggi, yaitu mencapai 2000 – 3000 mm/tahun. Kondisi seperti ini sepatutnya memberikan nilai positif bagi Indonesia, karena dengan curah hujan

yang tinggi, ketersediaan air akan melimpah untuk menunjang kebutuhan penduduk Indonesia yang mencapai 239,9 juta jiwa (*World Population Data Sheet 2008*). Akan tetapi, jika air terlampau berlebih, bukan keuntungan yang diperoleh, malah kerugian. Kelebihan air tersebut akan menyebabkan luapan sungai yang pada akhirnya menjadi banjir. Jika penutup lahan di bagian hulu merupakan vegetasi yang rapat maka ketika hujan tidak akan menjadi masalah besar karena air tersebut akan ditahan oleh vegetasi dan lama-kelamaan menyerap ke dalam tanah. Akan tetapi fenomena yang terjadi di Indonesia malah berbeda karena bagian hulu sungai umumnya menjadi lahan olah, sehingga ketika hujan, air tersebut akan langsung menjadi air limpasan dan pada akhirnya menjadi bencana banjir.

Fenomena tersebut terjadi hampir di seluruh kawasan rawan banjir di Indonesia. Khususnya di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Kecamatan Baleendah ini merupakan salah satu wilayah di Kawasan Bandung Selatan yang setiap tahunnya dilanda banjir, di samping Kecamatan Dayeuhkolot, Kecamatan Banjaran, Kecamatan Majalaya, dan Kecamatan Rancaekek. Kecamatan Baleendah termasuk wilayah terparah. Pada akhir Januari 2010, sekitar 870 orang warga Kampung Cieunteung Kelurahan Baleendah mengungsi karena banjir besar kembali merendam rumah mereka (Kompas, 1 Februari 2010). Air yang datang tiba-tiba membuat warga tidak sempat untuk menyelamatkan harta benda. Perabot rumah tangga rusak, beberapa rumah jebol dindingnya dan ada pula rumah yang rubuh karena terjangan banjir. Banjir terjadi lagi tepat pada Hari Raya Iedul Fitri, 10

September 2010 yang merendam 320 rumah dan membuat 350 Kepala Keluarga mengungsi. Untuk lebih jelasnya, gambaran peristiwa banjir dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Sumber: <http://www.koranjakarta.com/banjir/20sept2010/berita-detail.php.htm>

Gambar 1.1
Peristiwa Banjir di Kampung Cieunteung Kelurahan Baleendah Tanggal
13 September 2010

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah tersebut, mulai dari struktural maupun nonstruktural. Upaya yang paling sering dilakukan adalah pendekatan struktural. Fokus utamanya adalah pemulihan kondisi fisik semata, padahal jika ditelusuri penyebab utama banjir ini bukan dari faktor fisik/alam, namun dari perilaku manusia yang tidak memahami kondisi alam. Manusia hanya mengeksploitasi lahan tanpa memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan.

Perilaku manusia tersebut dapat dilihat di daerah Hulu Ci Tarum. Lahan yang tadinya merupakan hutan yang berfungsi sebagai penahan air dan cadangan air tanah diubah menjadi lahan pertanian hortikultura. Dengan

perubahan tersebut secara otomatis ketika hujan turun air tidak akan tertahan oleh vegetasi, namun langsung mengalir menjadi aliran permukaan (*run-off*). Hal ini selain menyebabkan cadangan air tanah berkurang juga dapat mempercepat turunnya air ke hilir dan ketika penampang sungai sudah tidak dapat lagi menampung, maka air tersebut akan meluap dan menjadi banjir. Pada bagian tengah Ci Tarum, masyarakat membuang limbah rumah tangga dan limbah industri yang akan menyebabkan pencemaran air sungai. Sementara di bagian hilir, lahan dipergunakan sebagai permukiman. Hal ini menyebabkan daerah yang terkena banjir menjadi semakin luas.

Masalah ini memang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan struktural saja, namun pendekatan non-struktural pun harus menjadi perhatian utama. Hal ini juga tidak dapat menyalahkan masyarakat, akan tetapi harus terciptanya kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat, dan penanganan yang terintegrasi baik di bagian hulu, tengah, maupun hilir.

Dalam Koran Pikiran Rakyat edisi 15 Maret 2010 disebutkan bahwa penanganan banjir di Ci Tarum harus melalui gerakan terintegrasi dari hulu ke hilir. Pada bagian hulu direncanakan penghijauan hutan kembali. Sementara masyarakat yang biasanya menggarap lahan pertanian diberikan alih mata pencaharian, yakni UKM di sektor perdagangan, baik kerajinan, peternakan atau perikanan yang masih dekat dengan pertanian. Untuk merealisasikan hal ini, pemerintah menganggarkan uang mencapai 1,5 milyar rupiah. Pada bagian hilir direncanakan ada relokasi penduduk di daerah yang rutin terkena banjir seperti Kampung Cieunteung, Kelurahan Andir dan Kampung Citepus. Pindah

rumah bukan merupakan hal yang mudah bagi siapa pun. Tidak terkecuali rumah tersebut membahayakan penghuninya. Kenyataan sampai saat ini semua penduduk masih bertahan, meski mereka tahu bahwa wilayahnya merupakan daerah rawan banjir. Itulah permasalahannya. Perlu ada upaya untuk mencari tahu latar belakang masyarakat untuk tetap tinggal di daerah rawan banjir. Oleh karena itu disinilah pentingnya penelitian ini dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dikemukakan di awal, kondisi banjir di Kecamatan Baleendah sudah cukup parah sehingga Pemerintah Kabupaten Bandung merencanakan relokasi permukiman. Karena pindah merupakan sesuatu hal yang tidak mudah, maka dianggap penting untuk mengetahui persepsi masyarakat korban banjir terhadap rencana relokasi ini. Oleh karena itu fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah “persepsi masyarakat korban banjir terhadap rencana relokasi permukiman pada daerah banjir di Kecamatan Baleendah”. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana persepsi masyarakat korban banjir terhadap potensi banjir di Kecamatan Baleendah?
2. Bagaimana mekanisme relokasi permukiman yang terkena banjir di Kecamatan Baleendah?
3. Bagaimana persepsi masyarakat korban banjir terhadap rencana relokasi permukiman pada daerah banjir di Kecamatan Baleendah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sangat tergantung pada judul penelitian dan masalah penelitian. Tujuan penelitian dapat mengarahkan peneliti untuk mencapai sasaran dan target yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi persepsi masyarakat korban banjir terhadap potensi banjir di Kecamatan Baleendah.
2. Mengidentifikasi mekanisme relokasi permukiman yang terkena banjir di Kecamatan Baleendah.
3. Mengidentifikasi persepsi masyarakat korban banjir terhadap rencana relokasi permukiman pada daerah banjir di Kecamatan Baleendah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini ialah:

1. Teridentifikasinya persepsi masyarakat korban banjir terhadap potensi banjir di Kecamatan Baleendah.
2. Teridentifikasinya mekanisme relokasi permukiman yang terkena banjir di Kecamatan Baleendah.
3. Teridentifikasinya persepsi masyarakat korban banjir terhadap rencana relokasi permukiman pada daerah banjir di Kecamatan Baleendah.
4. Sebagai informasi bagi Pemerintah setempat dan pihak-pihak terkait dalam menentukan kebijakan terhadap penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Baleendah.

1.5 Definisi Operasional

Memperhatikan judul penelitian, ada beberapa konsep yang perlu dijelaskan secara operasional, yaitu persepsi masyarakat korban banjir, potensi banjir dan relokasi permukiman.

1.5.1 Persepsi Masyarakat Korban Banjir

Persepsi menurut Rakhmat (1998:51) adalah “pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan”.

Adapun definisi masyarakat menurut Koenjaraningrat (1994:14) adalah “kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama”.

Korban bencana menurut Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah “orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana”. Untuk korban banjir ini, orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat banjir.

Persepsi masyarakat korban banjir adalah suatu gambaran yang diberikan masyarakat yang terkena dampak dari banjir mengenai suatu obyek atau peristiwa. Adapun obyek atau peristiwa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah potensi banjir dan rencana relokasi yang dicanangkan pemerintah setempat.

1.5.2 Potensi Banjir

Potensi adalah kemungkinan atau kecenderungan yang ada pada sesuatu. Adapun banjir adalah aliran air di permukaan tanah (*surface water*) yang relatif

tinggi dan tidak dapat ditampung oleh saluran drainase atau sungai, sehingga melimpah ke kanan dan kiri serta menimbulkan genangan/aliran dalam jumlah melebihi normal dan mengakibatkan kerugian pada manusia. Jadi potensi banjir adalah suatu kecenderungan banjir yang ada pada suatu wilayah. Dalam hal ini potensi banjir yang terjadi di Kecamatan Baleendah.

1.5.3 Relokasi Permukiman

Relokasi menurut Subagyo (2008:18) “adalah pemindahan tempat dalam pengertian ruang geografis, ekonomi, sosial, politik, lingkungan hidup, hingga ke ruang budaya”.

Permukiman menurut Sumaatmadja (1988:191) “adalah bagian permukaan bumi yang dihuni manusia meliputi segala prasarana dan sarana yang menunjang kehidupannya dan menjadi satu-kesatuan dengan tempat tinggal yang bersangkutan”.

Relokasi permukiman adalah pemindahan permukiman dari suatu tempat ke tempat lain dikarenakan tempat asalnya sudah tidak menunjang lagi. Menurut informasi yang telah diperoleh dari BAPPEDA Kabupaten Bandung dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung salah satu upaya penanggulangan banjir di Kecamatan Baleendah yaitu akan dilakukannya relokasi permukiman dari beberapa desa/kelurahan di Kecamatan Baleendah yang sering dilanda banjir, seperti Kelurahan Baleendah dan Kelurahan Andir ke Kelurahan Manggahang. Berdasarkan uraian pada definisi operasional tersebut, studi ini pada intinya bermaksud mengidentifikasi persepsi masyarakat terhadap rencana relokasi permukiman di Kecamatan Baleendah.